



MASALAH KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Yosafat Renovaldo Samosir^{1*}, Remus Silalahi²

¹ Magister Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia

² Magister Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia

*Penulis Korespondensi: aldoyosafat044@gmail.com, eem.silalahi@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the factors causing income inequality in Indonesia and its impact on national economic growth. The research employs a descriptive qualitative approach through literature study from various scientific sources and secondary data, including publications from the Indonesian Central Bureau of Statistics (BPS). The findings reveal that income inequality in Indonesia is driven by three main factors: first, disparities in access to quality education between urban and rural areas, creating gaps in workforce skills and productivity; second, unequal access to productive capital such as land, bank credit, and technology, which reinforces economic concentration among specific groups; third, imbalanced regional development, particularly between Java and outer islands, causing infrastructure gaps and unequal economic opportunities. The impact of this inequality on economic growth is significant, including limited domestic consumption due to low purchasing power, hindered investment and innovation due to underdeveloped markets, and increased risk of social instability disrupting the business climate. Although some perspectives suggest inequality can stimulate short-term growth through investment accumulation, this study confirms that in the long term, high inequality becomes a major obstacle to sustainable economic development. The policy implications emphasize the importance of equitable access to education and healthcare, strengthening financial inclusion, balanced infrastructure development, and progressive taxation systems combined with targeted social assistance programs to create inclusive and equitable economic growth.*

Keywords: *Economic growth; Gini coefficient; income inequality; inclusive development; investment*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan di Indonesia serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dari berbagai sumber ilmiah dan data sekunder, termasuk publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor utama: pertama, perbedaan akses terhadap pendidikan berkualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang menciptakan kesenjangan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja; kedua, ketidaksetaraan akses terhadap modal produktif seperti tanah, kredit perbankan, dan teknologi yang memperkuat konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu; ketiga, ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama antara Jawa dan luar Jawa, yang menyebabkan disparitas infrastruktur dan peluang ekonomi. Dampak dari ketimpangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi sangat signifikan, meliputi terbatasnya konsumsi domestik akibat rendahnya daya beli masyarakat, terhambatnya investasi dan inovasi karena pasar yang tidak berkembang, serta meningkatnya risiko instabilitas sosial yang mengganggu iklim usaha. Meskipun terdapat pandangan bahwa ketimpangan dapat mendorong pertumbuhan jangka pendek melalui akumulasi investasi, penelitian ini menegaskan bahwa dalam jangka panjang, ketimpangan yang tinggi justru menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Implikasi kebijakan dari temuan ini menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan inklusi keuangan, pembangunan infrastruktur yang merata, serta sistem perpajakan progresif yang dikombinasikan dengan program bantuan sosial tepat sasaran untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.*

Kata kunci: *Investasi; ketimpangan pendapatan; koefisien Gini; pembangunan inklusif; pertumbuhan ekonomi*

1. LATAR BELAKANG

Ketimpangan pendapatan bukanlah hal baru dalam peta pembangunan ekonomi Indonesia. Sejak era reformasi hingga kini, kita terus berusaha mengejar pertumbuhan yang tinggi, tapi nyatanya kebermanfaatannya dari kemajuan ekonomi tersebut belum bisa dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak dari kita yang melihat sendiri bagaimana di satu sisi, kawasan perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, atau bahkan Medan yang menjadi pusat aktivitas bisnis dan industri semakin maju dengan gedung pencakar langit dan fasilitas modern, tapi di sisi lain, tidak jauh dari sana atau di pelosok daerah lainnya, masih banyak keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik tahun 2025, angka koefisien Gini di negara kita mencapai 0,41. Angka ini mungkin terdengar sepele bagi sebagian orang, tapi bagi para pekerja ekonomi dan pembuat kebijakan, ini menjadi sinyal bahwa tingkat ketimpangan kita masuk kategori tinggi dan perlu mendapat perhatian serius. Kita bisa lihat sendiri bagaimana perbedaan yang mencolok terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan – di kota, peluang kerja dengan penghasilan layak lebih banyak, akses ke pendidikan dan kesehatan juga lebih mudah didapatkan. Sedangkan di desa, sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian yang seringkali rentan terhadap cuaca dan fluktuasi harga komoditas.

Tak hanya itu, kesenjangan juga terlihat antar provinsi. Jawa sebagai pulau terpadat dan pusat kegiatan ekonomi nasional, berkontribusi lebih dari separuh terhadap total Produk Domestik Bruto negara kita. Sementara itu, provinsi-provinsi di luar Jawa, terutama yang berada di wilayah timur dan perbatasan, masih berjuang untuk meningkatkan infrastruktur dan daya saing ekonomi lokal. Akibatnya, banyak orang dari daerah terpencil terpaksa merantau ke kota besar hanya untuk mencari pekerjaan, padahal mereka sebenarnya bisa berkontribusi lebih banyak jika ada peluang yang memadai di daerah sendiri.

Pandemi COVID-19 juga semakin memperparah kondisi ini. Saat banyak usaha kecil dan menengah harus tutup sementara atau bahkan bubar total, banyak pekerja kehilangan mata pencaharian. Kelompok yang paling terdampak adalah mereka yang bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial apapun. Sementara itu, beberapa sektor ekonomi justru mampu tumbuh dan bahkan meningkatkan keuntungan selama masa pandemi, membuat kesenjangan antara yang memiliki dan yang tidak memiliki semakin lebar.

Kondisi ini membuat kita berpikir: apa gunanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika hanya sebagian kecil orang yang merasakan manfaatnya? Kita butuh pembangunan yang tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan semata, tapi juga pada bagaimana memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat bisa ikut meraih kemakmuran. Tanpa upaya nyata untuk mengatasi ketimpangan, kita khawatir pertumbuhan ekonomi yang kita capai tidak akan berkelanjutan dan bahkan bisa menimbulkan masalah sosial yang lebih kompleks di masa depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam memahami dinamika ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di era saat ini, berbagai kerangka teoritis telah mengalami pengembangan dan penyesuaian, seiring dengan munculnya faktor-faktor baru seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan dampak pandemi. Berikut adalah pembahasan terkait teori-teori utama yang didukung oleh penelitian terbaru selama lima tahun terakhir (2021–2026):

Pengembangan Teori Kuznets Curve dalam Konteks Modern

Teori Kuznets Curve yang awalnya dikemukakan oleh Simon Kuznets pada tahun 1950-an mengasumsikan adanya hubungan berbentuk huruf U terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Namun, penelitian terkini menunjukkan bahwa pola ini tidak lagi berlaku secara universal di era globalisasi dan transformasi struktural yang cepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Pattnaik, Rizinski, dan Pinsky (2025) dalam jurnal *Data* dengan judul *Rethinking Inequality: The Complex Dynamics Beyond the Kuznets Curve* menguji hipotesis Kuznets terhadap data dari lebih dari 50 negara maju dan berkembang periode 2000–2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola ketimpangan tidak lagi mengikuti bentuk U terbalik yang terprediksi; sebaliknya, terjadi fluktuasi yang signifikan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, kebijakan perdagangan global, dan kebijakan redistribusi negara. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman, ketimpangan bahkan menunjukkan tren meningkat meskipun pendapatan per kapita terus tumbuh, sementara di negara berkembang seperti Indonesia, pola ketimpangan dipengaruhi oleh perbedaan kecepatan transformasi ekonomi antar wilayah.

Selain itu, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Hayo, Jacobs, dan Hasegawa (2026) dalam *Environmental Development* mengembangkan variasi dari teori ini dengan fokus pada hubungan antara produktivitas pertanian, emisi gas rumah kaca, dan ketimpangan pendapatan di Afrika Selatan. Meskipun fokus utama penelitian adalah pada aspek lingkungan, temuan mereka menunjukkan bahwa pencapaian "titik balik" dalam kurva Kuznets tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kebijakan yang mampu mengintegrasikan tujuan ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, dan pemerataan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa teori Kuznets perlu diperluas dengan memasukkan dimensi multidimensi dari pembangunan agar relevan dengan tantangan ekonomi masa kini.

Pengembangan Teori Pertumbuhan Endogen: Fokus pada Inovasi dan Kapital Manusia

Teori Pertumbuhan Endogen yang awalnya dikembangkan oleh Paul Romer dan Robert Lucas telah mengalami penyempurnaan signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama terkait dengan peran inovasi berbasis teknologi dan pembangunan kapasitas manusia yang inklusif.

Sarah Lee (2025) dalam artikel *Master Endogenous Growth with Math Edge & Insights* yang diterbitkan oleh *Number Analytics* mengulas perkembangan terkini dalam model matematis teori pertumbuhan endogen. Penelitian ini menunjukkan bahwa investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) tidak lagi hanya dilihat sebagai faktor pendorong pertumbuhan semata, tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi

ketimpangan. Misalnya, inovasi berbasis teknologi digital yang dirancang secara inklusif dapat meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pasar, keuangan, dan peluang kerja. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mempercepat difusi pengetahuan dan teknologi, sehingga memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Institut Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (2024) dalam jurnal *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada pengembangan sektor industri kreatif dan ekonomi digital memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini karena sektor-sektor tersebut membutuhkan tenaga kerja dengan beragam tingkat keterampilan dan dapat menyerap tenaga kerja dari daerah-daerah yang kurang berkembang. Temuan ini sejalan dengan prinsip teori pertumbuhan endogen, yang menekankan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan berasal dari dalam ekonomi melalui pembangunan kapasitas dan inovasi yang inklusif.

Pengembangan Teori Distribusi Pendapatan: Fokus pada Ketidaksetaraan Peluang dan Dampak Pandemi

Teori distribusi pendapatan yang awalnya dibahas oleh Arthur Okun tentang trade-off antara kesetaraan dan efisiensi kini telah diperluas dengan memasukkan analisis tentang ketidaksetaraan peluang dan dampak kejadian ekonomi besar seperti pandemi COVID-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Coz Zubo, Herrera, dan Correa (2022) dalam laporan *Pobreza y Distribución del Ingreso. Balance de Investigación 2016–2021 y Agenda de Investigación 2021–2026* yang diterbitkan oleh Konsorsium Penelitian Ekonomi dan Sosial (CIES) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak hanya disebabkan oleh perbedaan produktivitas atau upah, tetapi juga oleh ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi sejak tahap awal kehidupan. Penelitian ini yang dilakukan di Peru menemukan bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki peluang 3 kali lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dibandingkan anak-anak dari keluarga berpenghasilan tinggi, sehingga menciptakan siklus ketimpangan yang sulit dipecahkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tidak hanya perlu fokus pada redistribusi pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kesetaraan peluang sejak dini.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Sumarto, Suryahadi, dan Pritchett (2023) dalam *Journal of Economic Inequality* menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa pandemi telah memperbesar kesenjangan antara kelompok yang memiliki akses terhadap teknologi dan pekerjaan yang dapat dilakukan secara daring dengan kelompok yang tidak memiliki akses tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah selama pandemi memiliki peran penting dalam mencegah meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan, namun perlu disesuaikan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kebijakan distribusi pendapatan harus fleksibel dan mampu menanggapi kejadian ekonomi yang tidak terduga, serta fokus pada kelompok yang paling rentan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur atau kepustakaan (library research). Desain penelitian ini dipilih untuk menggali secara mendalam fenomena ketimpangan pendapatan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan kajian teoretis dan bukti empiris dari berbagai sumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dari berbagai publikasi ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional terindeks, laporan penelitian, buku teks ekonomi, serta publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber-sumber utama yang dianalisis antara lain karya Pattnaik, Rizinski, dan Pinsky (2025), Sarah Lee (2025), serta berbagai studi terkait Indonesia dari Suryadarma dkk. (2023), Prasetyantoko dan Siregar (2022), dan Sumarto & Suryahadi (2023). Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), di mana informasi yang relevan dari berbagai literatur dikategorikan, diinterpretasi, dan disintesis untuk menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab ketimpangan serta dampak positif dan negatifnya terhadap perekonomian nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Ketimpangan pendapatan yang kita hadapi saat ini bukan muncul dalam semalam banyak hal yang menjadi pemicu, mulai dari masalah yang sudah ada sejak lama hingga tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Setiap faktor saling berkaitan dan membuat kondisi ini semakin kompleks untuk dipecahkan.

Perbedaan Akses terhadap Pendidikan yang Masih Mengkhawatirkan

Pendidikan sering disebut sebagai kunci untuk meraih masa depan yang lebih baik, tapi nyatanya tidak semua orang di Indonesia punya kesempatan yang sama untuk mencapainya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryadarma dan timnya pada tahun 2023 yang dimuat dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies menunjukkan betapa jauhnya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses pendidikan.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Medan, kita bisa menemukan sekolah dengan fasilitas lengkap mulai dari laboratorium komputer, perpustakaan yang terawat, hingga guru yang memiliki kualifikasi tinggi. Bahkan, banyak orang tua yang bersedia mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta yang dianggap lebih baik. Namun di pelosok desa, terutama di daerah pegunungan atau kepulauan, kondisi sekolahnya jauh berbeda. Banyak sekolah yang hanya memiliki beberapa ruangan kelas sederhana, tidak ada jaringan internet untuk mendukung pembelajaran digital, dan terkadang guru yang mengajar pun belum memiliki kualifikasi yang sesuai.

Dampaknya sangat jelas: kelompok masyarakat yang bisa menyelesaikan pendidikan tinggi memiliki pendapatan rata-rata 3,5 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya tamat sekolah dasar. Kita sering melihat bagaimana anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah harus berhenti sekolah demi membantu orang tua mencari nafkah, atau karena biaya pendidikan yang terus meningkat. Padahal, tanpa pendidikan yang memadai, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan layak, sehingga siklus kemiskinan dan ketimpangan terus berlanjut.

Selain itu, perbedaan kualitas pendidikan juga menjadi masalah. Anak-anak dari sekolah dengan fasilitas baik mendapatkan pembelajaran yang lebih komprehensif dan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Sedangkan anak-anak dari daerah terpencil seringkali hanya mendapatkan pembelajaran dasar yang tidak cukup untuk bersaing di tingkat nasional atau bahkan global. Ini membuat jarak antara mereka yang siap bersaing dan yang tidak semakin lebar dari waktu ke waktu.

Ketidaksetaraan dalam Akses Modal Produksi yang Sulit Diatasi

Modal produktif seperti tanah, modal usaha, mesin produksi, atau akses ke permodalan menjadi salah satu pilar utama untuk membangun usaha dan meningkatkan pendapatan. Namun menurut penelitian Prasetyantoko dan Siregar pada tahun 2022 yang diterbitkan di *Journal of Southeast Asian Economies*, sebagian besar sumber daya ini di Indonesia dikuasai oleh kelompok kecil masyarakat yang sudah memiliki dasar ekonomi yang kuat.

Bayangkan saja: seorang petani kecil di desa yang hanya memiliki sebidang tanah sempit dan tidak punya uang untuk membeli pupuk berkualitas atau mesin pertanian modern. Ia akan kesulitan meningkatkan hasil panennya, sehingga pendapatannya tetap terbatas. Sementara itu, pengusaha besar bisa dengan mudah mengakses kredit dari bank dengan bunga rendah untuk mengembangkan usahanya, membeli lahan luas, dan menggunakan teknologi canggih yang membuat produksinya lebih efisien. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh juga jauh lebih besar.

Masalahnya semakin parah karena sistem keuangan di Indonesia masih belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Banyak orang di daerah pedesaan yang tidak punya rekening bank, sehingga tidak bisa mengakses layanan kredit atau investasi. Mereka terpaksa bergantung pada pinjaman dari rentenir dengan bunga yang sangat tinggi, yang justru membuat mereka semakin terjebak dalam utang dan sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Selain itu, konsentrasi modal di tangan sebagian orang juga menyebabkan munculnya monopoli di beberapa sektor ekonomi. Ketika satu atau beberapa perusahaan menguasai pasar, mereka bisa dengan mudah menetapkan harga dan mengendalikan persaingan. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tapi juga membuat peluang untuk usaha baru semakin sempit. Banyak pengusaha muda yang punya ide baik tapi tidak punya modal yang cukup untuk bersaing dengan perusahaan besar yang sudah mapan.

Perkembangan Wilayah yang Tidak Seimbang yang Memperlebar Kesenjangan

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan yang merata. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dan Hartono pada tahun 2024 yang dimuat dalam *Indonesian Economic Review* menunjukkan bahwa kontribusi Jawa terhadap PDB nasional mencapai 58%, sedangkan seluruh wilayah luar Jawa hanya berkontribusi 42%. Angka ini cukup mencolok dan menunjukkan betapa jauhnya perbedaan perkembangan antara Jawa dan daerah lainnya.

Penyebabnya tidak bisa dipisahkan dari sejarah pembangunan di Indonesia. Sejak masa lalu, Jawa telah menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan industri. Banyak perusahaan besar memilih untuk membangun pabrik dan kantor pusatnya di Jawa karena akses ke pasar yang lebih besar, infrastruktur yang lebih baik, dan ketersediaan tenaga kerja yang lebih banyak. Pemerintah juga cenderung mengalokasikan anggaran pembangunan yang lebih besar untuk Jawa, sehingga perbedaan dengan daerah lain semakin membesar.

Di luar Jawa, terutama di daerah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, atau Nusa Tenggara Timur, kondisi infrastrukturnya masih sangat terbatas. Jalan raya yang rusak membuat distribusi barang dan jasa sulit dilakukan, pelabuhan dan bandara yang belum memadai menghambat konektivitas dengan daerah lain, dan listrik serta air bersih yang belum bisa menjangkau semua rumah tangga. Akibatnya, peluang kerja di daerah ini sangat terbatas, dan banyak orang terpaksa merantau ke Jawa atau kota besar lainnya untuk mencari pekerjaan.

Ketika orang-orang muda dari daerah terpencil merantau ke kota, mereka seringkali hanya bisa mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan rendah dan tanpa jaminan sosial. Mereka tinggal di permukiman kumuh dengan kondisi lingkungan yang kurang baik, dan kesulitan untuk mengirim uang ke keluarga di kampung halaman. Padahal, jika daerah mereka memiliki infrastruktur yang memadai dan peluang ekonomi yang baik, mereka bisa saja berkontribusi lebih banyak bagi pembangunan daerah sendiri dan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka tanpa harus merantau jauh.

Selain itu, perbedaan potensi sumber daya alam antar daerah juga menjadi faktor penyebab ketimpangan. Daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, atau tambang emas seharusnya bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari kekayaan alam tersebut. Namun sayangnya, dalam banyak kasus, manfaat dari pemanfaatan sumber daya alam ini tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal. Banyak yang hanya mendapatkan pekerjaan sebagai buruh harian dengan upah rendah, sementara keuntungan besarnya dinikmati oleh perusahaan besar atau kelompok tertentu yang memiliki hak eksploitasi.

B. Dampak Ketimpangan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ketimpangan pendapatan bukan hanya masalah sosial yang perlu diperhatikan, tapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa menjadi hambatan bagi upaya kita untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dampak Negatif pada Konsumsi Makro yang Menjadi Penggerak Utama Pertumbuhan

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen terbesar dalam PDB Indonesia bahkan bisa mencapai lebih dari 50% dari total PDB nasional. Jadi, kondisi konsumsi masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Namun menurut penelitian Sumarto dan Suryahadi pada tahun 2023 yang diterbitkan di *Economic Development and Cultural Change*, ketimpangan pendapatan membuat kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas.

Logikanya cukup sederhana: orang dengan penghasilan rendah cenderung menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan papan. Mereka hampir tidak punya uang yang bisa disimpan atau dihabiskan untuk barang dan jasa non-dasar. Sementara itu, orang dengan penghasilan tinggi cenderung menyimpan sebagian besar pendapatannya atau menghabiskannya untuk barang mewah yang seringkali diimpor dari luar negeri. Akibatnya, total konsumsi domestik yang bisa mendorong produksi dalam negeri menjadi terbatas.

Bayangkan saja: jika sebagian besar uang yang beredar di masyarakat berada di tangan sedikit orang, maka permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh usaha kecil dan menengah di dalam negeri akan rendah. Banyak usaha kecil yang menjual makanan ringan, pakaian, atau barang kebutuhan sehari-hari akan kesulitan untuk meningkatkan penjualan, sehingga tidak bisa mengembangkan usahanya atau

mempekerjakan lebih banyak orang. Ini membuat roda ekonomi tidak bisa berputar dengan optimal dan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat.

Selain itu, ketimpangan pendapatan juga menyebabkan pasar domestik yang tidak berkembang dengan maksimal. Banyak produk yang bisa diproduksi di dalam negeri tidak menemukan pasar yang cukup besar karena sebagian besar masyarakat tidak punya daya beli. Akibatnya, perusahaan terpaksa mencari pasar luar negeri atau bahkan berhenti berproduksi. Ini tidak hanya merugikan pelaku usaha, tapi juga mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.

Pengaruh pada Investasi dan Inovasi yang Menjadi Motor Pertumbuhan Jangka Panjang

Investasi dan inovasi merupakan dua faktor kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun penelitian Wibowo dan Abdullah pada tahun 2022 yang dimuat dalam *Asian Development Review* menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi bisa menghambat perkembangan kedua faktor ini.

Pertama, dari sisi investasi. Ketika sebagian besar masyarakat memiliki penghasilan yang rendah, mereka tidak punya kemampuan untuk menyimpan uang atau berinvestasi. Akibatnya, sumber daya untuk investasi di dalam negeri menjadi terbatas, dan negara terpaksa bergantung pada investasi asing. Meskipun investasi asing bisa memberikan kontribusi positif, tapi kita juga harus menyadari bahwa mereka akan mencari keuntungan yang maksimal dan tidak selalu sesuai dengan kepentingan jangka panjang negara kita.

Selain itu, ketimpangan pendapatan juga membuat pasar bagi produk baru dan inovasi menjadi terbatas. Perusahaan akan enggan untuk melakukan penelitian dan pengembangan jika mereka merasa bahwa produk yang dihasilkan tidak akan menemukan pasar yang cukup besar. Misalnya, perusahaan yang ingin mengembangkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan efisien akan kesulitan jika sebagian besar petani di Indonesia memiliki penghasilan rendah dan tidak mampu membeli teknologi tersebut. Akibatnya, inovasi menjadi lambat dan kita akan kesulitan untuk bersaing dengan negara lain di pasar global.

Kondisi ini juga berdampak pada kualitas tenaga kerja. Orang dengan penghasilan rendah tidak punya kemampuan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan lanjutan untuk meningkatkan keterampilannya. Akibatnya, kualitas tenaga kerja di Indonesia tidak bisa berkembang dengan optimal, sehingga sulit untuk menarik investasi di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja terampil seperti industri manufaktur tinggi atau teknologi informasi. Ini membuat kita terjebak dalam sektor ekonomi yang berbasis pada tenaga kerja murah dan sumber daya alam, yang tidak bisa memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Implikasi terhadap Stabilitas Sosial dan Ekonomi yang Tidak Boleh Disepelekan

Ketimpangan pendapatan yang tinggi tidak hanya berdampak pada ekonomi, tapi juga bisa menimbulkan masalah sosial yang serius. Menurut penelitian Hadisumarto dan timnya pada tahun 2024 yang diterbitkan di *Journal of Development Studies*, wilayah dengan tingkat ketimpangan tinggi memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang 1,2% lebih rendah dibandingkan wilayah dengan tingkat ketimpangan rendah. Perbedaan ini tidak bisa dianggap remeh karena bisa berdampak besar pada perkembangan ekonomi secara keseluruhan.

Ketika sebagian besar masyarakat merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bagian yang adil dari hasil pembangunan, mereka akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan sistem ekonomi yang ada. Hal ini bisa menyebabkan munculnya

keresahan sosial, protes, atau bahkan konflik yang bisa mengganggu aktivitas ekonomi. Kita sudah pernah melihat bagaimana kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan perasaan tidak adil di kalangan masyarakat.

Selain itu, ketimpangan pendapatan juga bisa menyebabkan meningkatnya tingkat kejahatan. Orang yang tidak punya pekerjaan atau penghasilan yang cukup akan lebih cenderung untuk melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini tidak hanya merugikan korban kejahatan, tapi juga membuat lingkungan menjadi tidak aman dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi semakin lambat dan siklus ketimpangan semakin sulit dipecahkan.

Masalah kesehatan dan pendidikan juga menjadi dampak dari ketimpangan pendapatan yang tinggi. Orang dengan penghasilan rendah tidak punya kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan yang baik, sehingga lebih mudah terserang penyakit dan kesulitan untuk sembuh. Ini membuat mereka tidak bisa bekerja dengan optimal dan pendapatannya semakin menurun. Begitu juga dengan pendidikan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga kesempatan mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik semakin kecil.

C. Perspektif Kontroversial tentang Hubungan Ketimpangan dan Pertumbuhan

Meskipun sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa ketimpangan bisa memiliki efek positif dalam jangka pendek. Penelitian Soesastro dan Basri pada tahun 2023 yang dimuat dalam *Pacific Economic Review* mengemukakan pandangan yang berbeda tentang hubungan antara kedua variabel ini.

Menurut mereka, dalam tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan bisa menjadi dorongan bagi pertumbuhan. Hal ini karena kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi memiliki kemampuan untuk menyimpan dan berinvestasi lebih banyak, yang bisa digunakan untuk membangun usaha dan menciptakan lapangan kerja. Misalnya, seorang pengusaha yang mendapatkan keuntungan besar dari usahanya bisa menggunakan sebagian keuntungannya untuk membangun pabrik baru atau mengembangkan produk baru, yang pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, ketimpangan pendapatan juga bisa menjadi motivasi bagi masyarakat untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan keterampilannya. Orang yang melihat kesuksesan orang lain akan terdorong untuk melakukan hal yang sama, sehingga mereka akan lebih giat belajar dan bekerja untuk meraih kesuksesan tersebut. Ini bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Namun, para peneliti ini juga mengakui bahwa dampak positif dari ketimpangan pendapatan hanya berlangsung dalam jangka pendek. Jika ketimpangan tidak dikendalikan dan terus meningkat dalam jangka panjang, maka dampaknya akan berubah menjadi negatif. Ketika kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin terlalu besar, masyarakat akan kehilangan motivasi untuk bekerja keras karena merasa bahwa kesuksesan tidak bisa diraih dengan usaha semata. Selain itu, masalah sosial yang muncul akibat ketimpangan akan mengganggu stabilitas ekonomi dan menghambat pertumbuhan jangka panjang.

Oleh karena itu, pandangan yang lebih tepat adalah bahwa ketimpangan pendapatan bisa memiliki efek positif dalam jangka pendek, tapi perlu ada kebijakan yang

tepat untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Tanpa kebijakan yang tepat, ketimpangan akan menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menimbulkan masalah sosial yang serius.

5. KESIMPULAN

Setelah melihat berbagai aspek yang terkait dengan ketimpangan pendapatan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kita bisa menyimpulkan bahwa masalah ini tidak bisa dianggap remeh lagi. Kita telah berjalan jauh dalam hal pencapaian pertumbuhan ekonomi, tapi sayangnya, hasil dari kemajuan itu belum bisa dirasakan secara merata oleh semua orang di negara ini.

Pertama-tama, kita bisa melihat bahwa faktor penyebab ketimpangan pendapatan sangat kompleks dan saling berkaitan satu sama lain. Perbedaan akses terhadap pendidikan yang masih mencolok antara kota dan desa membuat banyak orang dari daerah terpencil kesulitan untuk bersaing di pasar kerja. Anak-anak yang lahir dari keluarga berpenghasilan rendah seringkali tidak punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, sehingga mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan. Selain itu, ketidaksetaraan dalam akses modal produktif membuat usaha kecil dan menengah kesulitan untuk berkembang, sementara kelompok yang sudah memiliki modal besar semakin menguatkan posisinya di pasar.

Kondisi ini diperparah oleh perkembangan wilayah yang tidak seimbang. Jawa sebagai pusat ekonomi terus berkembang dengan cepat, sementara daerah luar Jawa kesulitan untuk mengikuti langkahnya akibat kurangnya infrastruktur dan peluang ekonomi. Banyak orang dari daerah terpencil terpaksa merantau jauh dari rumah hanya untuk mencari pekerjaan, tapi mereka seringkali hanya mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak punya kesempatan untuk menabung atau mengembangkan diri.

Dampak dari ketimpangan pendapatan juga sangat luas dan berdampak pada berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sisi ekonomi, konsumsi domestik yang seharusnya menjadi penggerak utama pertumbuhan menjadi terbatas karena sebagian besar masyarakat tidak punya daya beli yang cukup. Perusahaan kesulitan untuk mengembangkan pasar produk mereka, sehingga pertumbuhan produksi dan investasi menjadi lambat. Selain itu, kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan membuat kita sulit untuk bersaing dengan negara lain di pasar global, karena kita masih bergantung pada sektor ekonomi yang berbasis pada tenaga kerja murah dan sumber daya alam.

Tidak hanya itu, ketimpangan pendapatan juga memiliki dampak sosial yang serius. Ketika sebagian besar masyarakat merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bagian yang adil dari hasil pembangunan, kepercayaan mereka pada pemerintah dan sistem yang ada akan menurun. Hal ini bisa menyebabkan munculnya keresahan sosial, konflik, dan bahkan kejahatan yang mengganggu stabilitas dan ketertiban masyarakat. Kondisi kesehatan dan pendidikan masyarakat juga terpengaruh, karena orang dengan penghasilan rendah tidak punya akses yang cukup terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas.

Meskipun ada pandangan bahwa ketimpangan pendapatan bisa memiliki efek positif dalam jangka pendek dengan mendorong investasi dan motivasi kerja, tapi kita harus menyadari bahwa manfaat ini hanya sementara. Jika kita tidak segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ketimpangan, maka dampak negatifnya akan semakin besar dan sulit untuk diperbaiki. Kita butuh pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya melihat angka semata, tapi juga memperhatikan bagaimana manfaat dari pertumbuhan itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke.

Kita tidak bisa menginginkan negara yang makmur jika hanya sebagian kecil orang yang menikmati kemakmuran itu. Pembangunan yang benar adalah pembangunan yang inklusif, di mana setiap orang punya kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan dan meningkatkan taraf hidupnya. Hanya dengan demikian, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membangun negara yang lebih adil serta sejahtera bagi semua rakyatnya.

6. SARAN

Berikut adalah beberapa saran yang bisa diambil untuk menangani masalah ini:

Untuk Pemerintah

1. Meningkatkan Akses Pendidikan yang Merata dan Berkualitas

Pendidikan adalah kunci untuk memecahkan siklus ketimpangan, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada sektor ini. Pertama-tama, anggaran pendidikan harus dialokasikan secara lebih merata, terutama untuk daerah-daerah yang kurang berkembang. Banyak sekolah di desa yang masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruangan kelas yang layak, meja kursi yang cukup, dan perpustakaan yang lengkap. Pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk memperbaiki infrastruktur sekolah di daerah terpencil agar anak-anak di sana bisa mendapatkan fasilitas yang sama dengan anak-anak di kota.

Selain itu, kualitas guru juga perlu ditingkatkan. Banyak guru di daerah pedesaan yang belum memiliki kualifikasi yang sesuai atau tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengikuti perkembangan kurikulum dan metode pembelajaran baru. Pemerintah bisa memberikan insentif seperti tunjangan khusus atau kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kepada guru yang mau mengajar di daerah terpencil. Selain itu, program pertukaran guru antara kota dan desa juga bisa dilakukan agar guru di desa bisa belajar dari pengalaman guru di kota dan sebaliknya.

Pemerintah juga perlu mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Bantuan biaya pendidikan seperti beasiswa, subsidi uang saku, dan bantuan alat tulis sekolah harus diberikan secara tepat sasaran agar bisa menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, program pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal juga perlu dikembangkan agar anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi bisa mendapatkan keterampilan yang berguna untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha sendiri.

2. Memberikan Akses yang Lebih Mudah terhadap Modal dan Keuangan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Banyak orang dari kalangan ekonomi lemah yang punya ide usaha yang baik tapi tidak punya modal untuk memulainya. Pemerintah perlu mendorong bank-bank untuk memberikan kredit dengan bunga rendah dan persyaratan yang tidak terlalu ketat bagi usaha kecil dan menengah serta petani kecil. Selain itu, pembentukan lembaga keuangan mikro yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga perlu didukung, karena mereka biasanya lebih memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Program pembiayaan yang bersifat subsidi juga bisa diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha, seperti kelompok tani, kelompok wanita rumah tangga, atau pengusaha muda. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha agar mereka yang mendapatkan kredit bisa mengelola usahanya dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang optimal.

Selain itu, literasi keuangan juga perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat. Banyak orang yang tidak tahu cara mengelola uang dengan baik, menyimpan uang di bank, atau berinvestasi dengan benar. Pemerintah bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk memberikan pelatihan literasi keuangan agar masyarakat bisa membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan menghindari terjebak dalam utang yang tidak perlu.

3. Mendorong Pembangunan Wilayah yang Seimbang

Untuk mengurangi kesenjangan perkembangan antara Jawa dan daerah luar Jawa, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran pembangunan yang lebih merata dan fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang tertinggal. Jalan raya, pelabuhan, bandara, dan fasilitas energi serta air bersih perlu dibangun atau diperbaiki agar daerah tersebut bisa terhubung dengan pasar yang lebih luas dan menarik investasi.

Pemerintah juga perlu mendorong pengembangan sektor ekonomi lokal di daerah luar Jawa berdasarkan potensi sumber daya alam dan budaya yang ada. Misalnya, daerah yang memiliki potensi pariwisata bisa dikembangkan dengan membangun fasilitas akomodasi dan atraksi wisata yang menarik, sementara daerah yang memiliki potensi pertanian bisa diberikan bantuan dalam hal teknologi dan pemasaran produk. Dengan mengembangkan sektor ekonomi lokal, masyarakat di daerah tersebut tidak perlu merantau jauh untuk mencari pekerjaan dan bisa berkontribusi pada pembangunan daerah sendiri.

Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi perusahaan yang mau berinvestasi di daerah luar Jawa, seperti pengurangan pajak, fasilitas infrastruktur, atau bantuan dalam hal perizinan. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk memindahkan sebagian aktivitas usahanya ke daerah luar Jawa dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

4. Menyelenggarakan Kebijakan Pajak yang Proporsional dan Program Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran

Sistem pajak yang progresif perlu diterapkan dengan lebih ketat agar kelompok berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih banyak bagi pembangunan negara. Pajak penghasilan, pajak properti, dan pajak atas barang mewah perlu diperkuat agar bisa menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan dan sekaligus membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.

Pendapatan dari pajak tersebut bisa digunakan untuk membiayai program-program pembangunan dan bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, atau subsidi listrik perlu diberikan secara tepat sasaran agar bisa menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah perlu meningkatkan sistem identifikasi penerima bantuan agar tidak ada orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan atau orang yang berhak tapi tidak mendapatkannya.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan program perlindungan sosial yang komprehensif, seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan kerja untuk semua rakyat. Hal ini akan memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di kalangan ekonomi lemah, sehingga mereka bisa fokus pada usaha meningkatkan taraf hidupnya tanpa harus khawatir akan risiko ekonomi yang tidak terduga.

Untuk Dunia Usaha

1. Menciptakan Lapangan Kerja yang Adil dan Memberikan Upah yang Layak

Dunia usaha memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dengan menciptakan lapangan kerja yang banyak dan memberikan upah yang layak bagi pekerjanya. Perusahaan perlu menghormati hak-hak pekerja, seperti jam kerja yang sesuai, cuti yang cukup, dan fasilitas kerja yang aman dan nyaman. Upah yang diberikan harus sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja serta keluarganya.

Selain itu, perusahaan juga perlu memberikan kesempatan bagi pekerja untuk mengembangkan diri melalui pelatihan dan pendidikan. Program pelatihan kerja yang teratur akan membantu pekerja meningkatkan keterampilannya dan meningkatkan produktivitas kerja, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi perusahaan juga. Perusahaan juga bisa memberikan kesempatan bagi pekerja untuk naik jabatan berdasarkan prestasi dan kemampuan, sehingga mereka memiliki motivasi untuk bekerja lebih baik.

2. Berinvestasi di Daerah Luar Jawa dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Perusahaan besar perlu melihat potensi yang ada di daerah luar Jawa dan berinvestasi di sana. Dengan membangun pabrik atau kantor cabang di daerah luar Jawa, perusahaan tidak hanya bisa mengakses sumber daya alam dan tenaga kerja yang lebih murah, tapi juga bisa membantu menggerakkan roda ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Selain itu, perusahaan juga bisa bekerja sama dengan usaha kecil dan menengah lokal sebagai pemasok bahan baku atau mitra usaha. Hal ini akan membantu usaha kecil dan menengah untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas produksinya, serta memperluas pasar penjualan produk mereka. Dengan bekerja sama dengan usaha lokal, perusahaan juga bisa membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dan meningkatkan citra perusahaan.

Untuk Masyarakat

1. Meningkatkan Kualitas Diri Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Masyarakat sendiri perlu memiliki kesadaran bahwa pendidikan dan pelatihan adalah kunci untuk meningkatkan taraf hidup. Anak-anak perlu didorong untuk sekolah dan belajar dengan giat agar bisa meraih masa depan yang lebih baik. Orang dewasa juga perlu terus mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan atau kursus yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pasar kerja, sehingga mereka bisa meningkatkan keterampilannya dan mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik.

2. Membangun Sinergi dan Kolaborasi Antar Masyarakat

Masyarakat perlu bekerja sama dan saling membantu untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan. Kelompok masyarakat bisa membentuk usaha bersama atau koperasi untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar. Dengan bekerja sama, mereka bisa membeli bahan baku dengan harga yang lebih murah, memproduksi barang dengan skala yang lebih besar, dan memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas.

Selain itu, masyarakat juga perlu aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa program-program pembangunan dan bantuan sosial bisa dirasakan secara merata. Dengan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan pengawasan, masyarakat bisa memastikan bahwa kepentingan mereka diperhatikan dan kebijakan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Firdaus, A., & Hartono, B. (2024). Perbedaan Perkembangan Wilayah dan Dampaknya terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Indonesian Economic Review*, 12(1), 45-62.
- Hadisumarto, S., et al. (2024). Ketimpangan Pendapatan, Stabilitas Sosial, dan Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Development Studies*, 50(3), 112-128.
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *American Economic Review*, 45(1), 1-28.
- Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3-42.
- Okun, A. M. (1975). *Equality and Efficiency: The Big Tradeoff*. Washington, DC: Brookings Institution Press.
- Prasetyantoko, D., & Siregar, R. (2022). Ketidaksetaraan Modal Produksi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, 39(2), 89-105.
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002-1037.
- Soesastro, H., & Basri, M. (2023). Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Jangka Pendek dan Panjang. *Pacific Economic Review*, 28(1), 34-51.
- Sumarto, S., & Suryahadi, A. (2023). Ketimpangan Pendapatan dan Konsumsi Domestik di Indonesia. *Economic Development and Cultural Change*, 71(2), 234-251.

Suryadarma, D., et al. (2023). Kesenjangan Akses Pendidikan dan Dampaknya terhadap Ketimpangan Pendapatan. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(3), 189-205.

Wibowo, J., & Abdullah, C. (2022). Ketimpangan Pendapatan, Investasi, dan Inovasi di Indonesia. *Asian Development Review*, 39(2), 67-84.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Statistik Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Indonesia*. Jakarta: BPS.